



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN INTEGRASI *KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM* DI KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan advokasi kepada seluruh stakeholder pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan dan terbuka maka perlu dikembangkan integrasi *knowledge management system* di Kedepatian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Tim Integrasi *Knowledge Management System* di Kedepatian Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN TIM PENGEMBANGAN INTEGRASI *KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM* DI KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH**
- PERTAMA : Menetapkan Tim Pengembangan Integrasi *Knowledge Management System* di Kedepatian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menyusun dan merencanakan pengembangan Integrasi *Knowledge Management System* di Kedepatian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
 2. Melaksanakan kegiatan pengembangan Integrasi *Knowledge Management System* di Kedepatian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan Integrasi *Knowledge Management System* di Kedepatian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.

4. Melaporkan progres pelaksanaan pengembangan Integrasi *Knowledge Management System* di Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin pertama dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 2 Mei 2019
**DEPUTI BIDANG HUKUM
DAN PENYELESAIAN SANGGAH**

ttd

IKAK GAYUH PATRIASTOMO

Tembusan:

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM
 DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP
 NOMOR : 2 /SK/D.IV/05/2019
 TANGGAL : 2 MEI 2019

**SUSUNAN TIM PENGEMBANGAN
 INTEGRASI KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM DI KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM DAN
 PENYELESAIAN SANGGAH**

No	Tugas	Nama
1	Pengarah	M. Aris Supriyanto
2	Ketua Tim	Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya
3	Tim Keuangan	Samsiar
		Eko Prasetyo
4	Tim <i>Stakeholder Engagement</i>	Tjipto Prasetyo Nugroho
		Arif Budiman
		Hendra Damendra Numberi
		Ulya Awwalul Mar'ah
		Naning Nurhayati
5	Tim Pengembangan Database	Ade Rizky Emirsyah
		Muhamad Dwi Sumanto
		Imam Arumsyah
		Linda Mikowati
		Mira Erviana
		Eben Henry Reagen
		Aldo Jefry Sulisty
		Gusti Reza Prawiranegara
		Afdalul Zikri
6	Tim IT Development	Yudi Prasetyawan
		Nuraini Darmastuti
		Imelda Liliana
		Astri Erviana
		Anas Bayu Kusuma
		M. Taufikurrohman
		Sigit Sri Utomo

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 2 Mei 2019
 DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
 PENYELESAIAN SANGGAH

ttd

IKAK GAYUH PATRIASTOMO